

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam proses perdamaian perempuan acap kali ditempatkan di kursi penonton. Saat konflik, sistem patriarki yang berakar begitu mendalam, menyebabkan sering kali perempuan menjadi objek penindasan dan kekerasan berbasis gender. Konflik akhirnya menggalakkan ketidaksetaraan gender dan diskriminasi gender.<sup>1</sup> Di berbagai konflik, meningkatnya kesadaran dan ketidaknyamanan akan status quo, mendorong kaum perempuan yang dicap sebagai kaum lemah mengumpulkan keberanian melakukan gebrakan dengan terjun sebagai agen perdamaian untuk menyelesaikan berbagai konflik yang telah menimbulkan kerugian. Pengalaman akan kondisi sosial yang tidak aman menciptakan perubahan sikap kaum perempuan dan keberanian mengambil tindakan. Sayangnya, sekalipun para aktivis perempuan telah berupaya aktif berjuang menyelesaikan krisis konflik, kontribusi mereka masih kurang dikenal, serta ruang partisipasi belum terbuka dengan lebar.

Penelitian dari *UN Women* dari tahun 1992 hingga 2018 menemukan bahwa hanya 13% perempuan menduduki posisi seorang negosiator, 4% aktivis perempuan yang menjadi penandatangan perjanjian perdamaian dan 2.4% sebagai

---

<sup>1</sup> United Nations Peacekeeping, "Promoting Women, Peace and Security", diakses pada 24 Februari 2021 dari <https://peacekeeping.un.org/en/promoting-women-peace-and-security#:~:text=Women%20are%20also%20active%20agents,peace%20has%20been%20largely%20unrecognized.&text=UN%20Peacekeeping%20operations%20are%20mandated,Security%20across%20all%20peace%20functions>.

kepala mediator.<sup>2</sup> Stereotip sosial-budaya patriarki berpandangan bahwa kaum perempuan adalah korban sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai advokat perdamaian yang kritis. Para aktivis perempuan secara kasat mata cenderung diabaikan, dan secara sistematis maupun struktural dikucilkan dalam proses bina damai.<sup>3</sup>

Usaha demi usaha dari para aktivis perempuan terhambat dan tak terlihat dikarenakan belum ada landasan fundamental yang kokoh bagi mereka untuk berdiri. Kesadaran akan pentingnya mengikutsertakan aktivis perempuan membawa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan tindakan revolusioner dengan mengeluarkan Resolusi DK PBB 1325 (UNSCR 1325) tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di tahun 2000. Empat pilar dari UNSCR 1325 (2005) antara lain: partisipasi penuh perempuan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional pada semua tingkat dan tahap; perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan dari segala konflik kekerasan berbasis seksual dan gender; pencegahan dari segala krisis konflik, termasuk kekerasan seksual dalam konflik; dan tindakan bantuan dan pemulihan yang sensitif gender.<sup>4</sup>

Dalam mewujudkan perdamaian, keterlibatan perempuan tidak kalah penting dengan laki-laki. Sudah waktunya bagi kelompok perempuan untuk berdiri dari kursi penonton dan turut menjadi agen perdamaian. Perdamaian niscaya dapat

---

<sup>2</sup> UN Women, "The Power of Women Peacebuilders", (28 Oktober 2019), diakses pada 24 Februari 2021 dari <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/10/compilation-the-power-of-women-peacebuilders>

<sup>3</sup> Sara Hogberg, "Women and Peacebuilding in Rwanda and Sierra Leone: A Comparative Study of the Impacts of United States Resolution 1325", Soderton University, (2019), 8

<sup>4</sup> United Nations Security Council Resolution 1325, S/RES/1325 (31 Oktober 2000). Diakses pada 24 Februari 2021 dari <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/WPS%20SRES1325%20.pdf>

terwujud apabila ada kerjasama yang setara antara laki-laki dan perempuan. Berikut dikemukakan alasan mengapa partisipasi perempuan begitu krusial dalam perdamaian<sup>5</sup>. Pertama, sepanjang sejarah peradaban manusia kelompok perempuan sudah berkecimpung dan mendalami peran reproduktif (sebagai pengasuh dan seorang ibu). Sehingga, secara tidak langsung keterlibatan mereka melatih kepekaan terhadap segala gesekan konflik dan bentuk-bentuk kekerasan dan melatih menciptakan berbagai alternatif metode penyelesaian masalah yang damai.<sup>6</sup> Kedua, kerawanan posisi perempuan dalam hierarki sosial dan konflik mendorong kepekaan untuk menciptakan perdamaian (*peace-making*) dan membangun perdamaian (*peace-building*).<sup>7</sup> Menjadi langganan kelompok korban, kelompok perempuan mengadaptasi kemampuan mengobservasi potensi ancaman terhadap perjanjian perdamaian yang telah berlangsung maupun potensi terjadinya ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi dalam tahap membangun perdamaian.<sup>8</sup> Ketiga, kapabilitas aktivis perempuan dalam mengusung perdamaian di tingkat akar rumput sudah terbukti di banyak kasus konflik. Kelompok-kelompok aktivis perempuan membentuk koalisi lintas kelompok dan melaksanakan diskusi terkait penanganan konflik semasa konflik berlangsung.<sup>9</sup> Sebut saja organisasi perempuan *Sudanese Women Association in Nairobi* (SWAN) di Sudan Selatan yang mengadakan berbagai kelompok diskusi perdamaian.<sup>10</sup> Keempat,

---

<sup>5</sup> Edwin Tambunan, "Perempuan dan Perdamaian," dalam *The Good Samaritan: A Festschrift Dedicated to Dr. Dra. Hetty Antje Geru, M.Si.*, (Indonesia: ANDI, 2019): 262-264.

<sup>6</sup> Ho-Won Jeong, "Peace and Conflict Studies: An Introduction," (Aldershot, England: Ashgate Publishing Ltd, 2000): 83.

<sup>7</sup> Edwin Tambunan. Op. Cit.

<sup>8</sup> Ho-Won Jeong, Op. Cit.

<sup>9</sup> Edwin Tambunan. Op. Cit.

<sup>10</sup> Esther Soma, "Our Search for Peace: Women in South Sudan's National Peace Process 2005-2018", *UN Women, Oxfam and Born to Lead Project* (January 2020): 24.

keterlibatan aktivis perempuan dalam proses perdamaian menghasilkan peluang persetujuan damai yang bertahan selama 15 tahun atau meningkat sebesar 35%.<sup>11</sup> Keempat penjelasan sebelumnya menemukan bahwa aktivis perempuan memiliki kualitas dan kapabilitas untuk bersanding dengan aktivis laki-laki dalam mewujudkan perdamaian. Upaya pengarusutamaan perempuan dalam proses perdamaian meliputi dua tahap yaitu pengakuan (*recognition*) dan inklusi (*inclusion*).<sup>12</sup> Pengakuan adalah upaya pengungkapan kapasitas perempuan terlibat dalam perdamaian melalui penguraian pencapaian-pencapaian kerja yang sudah dilakukan. Penulisan penelitian ini menjadi salah satu pengejawantahan proses pengakuan. Dalam proses inklusi, ada berbagai tahap penanganan konflik yang dapat diikuti perempuan, salah satunya adalah bina damai.<sup>13</sup>

Salah satu partisipasi penuh perempuan dalam proses perdamaian yaitu melalui bina damai (*peacebuilding*). Bina damai adalah upaya untuk mencapai perdamaian positif dengan mengentaskan akar penyebab konflik dan meniadakan adanya kekerasan struktural dan kekerasan budaya. Bina damai merujuk pada upaya resolusi konflik yang bertujuan mencapai damai yang berkepanjangan dan menginkorporasi transformasi dalam rakyat.<sup>14</sup> Beberapa upaya dari bina damai berupa bantuan kemanusiaan, membangun sistem pemerintahan demokratis, dan negosiasi perdamaian. Peran bina damai juga berlangsung di keseluruhan fase

---

<sup>11</sup> Nancy Lindborg, "The Essential Role of Women in Peacebuilding," *United States Institute of Peace*, 2017, diakses pada 24 Februari 2021 di <https://www.usip.org/publications/2017/11/essential-role-women-peacebuilding>.

<sup>12</sup> Edwin Tambunan, "Perempuan dan Perdamaian," dalam *The Good Samaritan: A Festschrift Dedicated to Dr. Dra. Hetty Antje Geru, M.Si.*, (Indonesia: ANDI, 2019): 265.

<sup>13</sup>

<sup>14</sup> Johan Galtung, "Conflict Intervention," in *Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*, (London: Sage, 1996), 103-113.

konflik, yakni sebelum konflik pecah (*preventive diplomacy*), saat konflik tengah berjalan, dan se usai konflik berakhir (*post-peacebuilding*) yang berfokus pada rekonstruksi dan rehabilitasi.<sup>15</sup> Negara-negara rawan konflik dengan kondisi lingkungan yang berbahaya dan tidak aman sehingga mengancam kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat menjadi kategori negara dengan tingkat urgensi tinggi membutuhkan penerapan pelaksanaan proses bina damai. Sudan Selatan menjadi salah satu negara yang tercantum dalam agenda prioritas membutuhkan pelaksanaan bina damai.<sup>16</sup>

Sekalipun sudah merdeka pada 29 Juli 2011, ketegangan dan konflik di Sudan Selatan terus hadir dan memanas. Secara retrospektif, konflik di Sudan pecah sejak dari kemerdekaan di tahun 1956 yang menghasilkan pemisahan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan saat pemerintahan koloni Inggris. Sejak itu Sudan Selatan berhadapan dengan perang saudara secara konstan, berkepanjangan, dan paling mematikan di tahun 1956-1972 dan 1983-2005. Konflik yang berlangsung dari 1983-2005 – di mana Sudan Selatan berperang melawan marginalisasi politik dan ekonomi dari pemerintahan Khartoum - merenggut lebih dari 1.9 juta penduduk, sementara 4 juta lebih penyintas terpaksa mencari suaka di negara tetangga seperti Kenya dan Uganda. Perempuan dan anak-anak secara langsung terkena dampak konflik di Sudan Selatan. Mayoritas populasi tempat pengungsian

---

<sup>15</sup> Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse & Hugh Miall, "Peacebuilding", in *Contemporary Conflict Resolution*, (Cambridge, UK: Polity Press, 2008), 215-230.

<sup>16</sup> Johan Galtung, "*Peace by Peaceful Means: Peace and Conflict, Development and Civilization*", (Oslo, Norway: Peace Research Institute Oslo – PRIO, 1996): 72.

PBB merupakan perempuan dan anak-anak, dengan lebih dari 60 persen pengungsi Sudan Selatan berusia di bawah 18 tahun.<sup>17</sup>

Konflik berkepanjangan ini menyuguhkan dampak negatif bagi para perempuan sebagai korban dari kekerasan struktural dan seksual. Perempuan harus mengganti laki-laki sebagai kepala keluarga yang mengurus dan memenuhi segala kebutuhan keluarga; menjadi buruh paksaan; tidak mendapat akses pendidikan dan kesehatan; dan menjadi korban kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual.<sup>18</sup> Komunitas Sudan Selatan sarat akan budaya patriarki dan memosisikan kaum perempuan sebagai kaum terendah atau berada di kelas sosial lebih dari laki-laki, sehingga terjadi situasi menormalisasi dan mentoleransi kekerasan seksual terhadap perempuan.<sup>19</sup> Para tentara mendukung melakukan pemerkosaan sebagai suatu kesenangan dan peningkatan harga diri. Tak sedikit kaum perempuan mengidap penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS dan mengalami PTSD (*post traumatic stress disorder*).<sup>20</sup>

Konflik berkepanjangan yang hadir di Sudan Selatan begitu mencekam dan membawa kemunduran bagi kemanusiaan. Krisis merajalela di berbagai sektor: krisis kemanusiaan, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis kekerasan. Berbagai desakan dari pihak eksternal (negara-negara dan organisasi internasional) maupun internal (rakyat Sudan Selatan) berupaya menemukan

---

<sup>17</sup> Mercy Corps, “The Facts: What You Need to Know About the South Sudan Crisis”, (2019), diakses pada 9 September 2021 di <https://www.mercycorps.org/blog/south-sudan-crisis#who-affected-in-south-sudan>

<sup>18</sup> Zaynab Elsawi, “Women Building Peace: The Sudanese Women Empowerment for Peace in Sudan”, *Association for Women’s Rights in Development (AWID)*, (2011), 2.

<sup>19</sup> Liezelle Kumalo & Cassie Roddy-Mullineaux, “Sustaining Peace: Harnessing the Power of South Sudanese Women”, East Africa: Institute for Security Studies, (2019), 1-15.

<sup>20</sup> Lydia Stone, “A Continuum of Suffering: Violence Against Women and Girls in the South Sudan Conflict”, *Humanitarian Practice Network*, (2017), diakses pada Rabu, 24 Februari 2021 di <https://odihpn.org/magazine/continuum-suffering-violence-women-girls-south-sudan-conflict/>

solusi penyelesaian konflik agar perdamaian dapat segera terwujud di Sudan Selatan.

Sejumlah penyelesaian akhirnya dicapai. Pertama, *the Comprehensive Peace Agreement* (CPA) tahun 2005 yang mengakhiri dua dekade Perang Sipil Sudan antara pemerintah Sudan dan *Sudan People Liberation Army* (SPLA) dengan *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD). Inggris, Norwegia, Amerika Serikat, dan Italia menjadi fasilitator negosiasi perdamaian tersebut. Kedua, *the Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan* (ARCSS) tahun 2015. Ketiga, *the Revitalized Agreement on the Resolution of the Conflict in South Sudan* (R-ARCSS) tahun 2018. Akan tetapi, di tengah setiap upaya mengimplementasi perjanjian perdamaian ini, konflik terus hadir dan tak terbendung hingga menghambat jalannya perjanjian tersebut.

Dalam tatanan masyarakat Sudan Selatan, kaum perempuan sempit kesempatannya dalam mengemukakan pendapat.<sup>21</sup> Namun, ada goresan sejarah baru yang tergaris. Perjalanan partisipasi para aktivis perempuan Sudan Selatan (individu dan secara organisasi) dalam upaya perdamaian di Sudan Selatan bermula pada proses perumusan perjanjian perdamaian pertama di Sudan yang disebut CPA 2005.<sup>22</sup> Kesempatan gemilang didapatkan saat para aktivis perempuan mengambil bagian dalam ketiga perjanjian perdamaian yang telah disepakati dan dilaksanakan oleh Sudan Selatan.<sup>23</sup> Para aktivis perempuan dari

---

<sup>21</sup> Catherine Huser, "Conflict and Gender Study – South Sudan: Addressing Root Causes Programme", ed. Salome Zuriel, ACORD, (2018): 27.

<sup>22</sup> Esther Soma, "Our Search for Peace: Women in South Sudan's National Peace Process 2005-2018", *UN Women, Oxfam and Born to Lead Project* (January 2020): 15.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 10-11.

setiap tingkat – akar rumput, menengah, dan atas - bersinergi demi pelaksanaan setiap isi dari perjanjian perdamaian tersebut. Keinginan untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan melalui bina damai dilakukan mereka dengan berbagai rangkaian variasi metode dan strategi.

Dari penguraian latar belakang diatas nampak bahwa terwujudnya inisiatif aktivis perempuan untuk berkontribusi menciptakan stabilitas dan perdamaian nasional merupakan hal yang menarik untuk ditelaah secara sistematis dan analitis. Maka dari itu penelitian ini hendak mengkaji segenap proses dan kontribusi para aktivis perempuan dalam usaha perdamaian ke dalam skripsi yang berjudul: **Peran Aktivis Perempuan Mewujudkan Perdamaian melalui Proses Bina Damai di Sudan Selatan (2005-2018).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sudan Selatan menjadi salah satu negara dengan catatan konflik berkepanjangan sepanjang sejarah, bahkan sekalipun telah meraih kemerdekaan. Beban yang dihadapi kelompok perempuan di Sudan Selatan begitu berat dan memberikan dampak traumatis. Peran aktivis perempuan dalam menangani konflik yang tengah terjadi, proses peran bina damai yang tengah diberlakukan, dan respons masyarakat terhadap gerakan bina damai oleh aktivis perempuan akan menjadi fokus pembatasan masalah dalam penelitian ini.

Penelitian ini difokuskan pada rentang waktu dari tahun 2005 hingga tahun 2018 dengan berlandaskan bahwa di tahun tersebut terjadi empat kejadian nasional (lahirnya tiga kesepakatan perdamaian komprehensif dan kemerdekaan

Sudan Selatan) yang diharapkan dapat meresmikan realisasi perdamaian, serta kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan penguraian masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana aktivis perempuan berperan dalam proses bina damai di Sudan Selatan?
2. Bagaimana respons masyarakat Sudan Selatan terhadap proses bina damai yang dilaksanakan aktivis perempuan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Melihat betapa gigihnya kaum aktivis perempuan melaksanakan usaha pemulihan di berbagai sektor – seperti ekonomi, politik, kemanusiaan, dan sosial – akibat dari konflik yang berkepanjangan, maka penelitian ini hendak mengkaji peran aktivis perempuan dalam melaksanakan bina damai secara terstruktur dengan mengacu pada lapisan piramida aktor dari tingkat akar rumput, tingkat menengah, dan tingkat atas beserta tiap strategi pendekatan yang dilaksanakan di setiap tingkat tersebut. Selain itu, penulis hendak mengetahui respons atau tanggapan dari pemerintah, pemuka agama, masyarakat akar rumput dan kelompok perempuan akan implementasi proses bina damai yang tengah dilaksanakan oleh aktivis perempuan di Sudan Selatan.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan terkait setiap langkah dan upaya para aktivis perempuan dalam mewujudkan perdamaian melalui peran bina damai di Sudan Selatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan

berkontribusi menjadi bahan referensi baru dan inspirasi bagi mahasiswa, masyarakat dan aktivis perempuan Indonesia untuk semakin vokal terlibat dalam berbagai proses dalam peran bina damai, khususnya dalam kesetaraan gender.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang dirancang penulis dalam penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bagian dengan tujuan dapat memudahkan pembaca membaca dan memahami secara komprehensif terkait observasi yang dituangkan dalam penelitian.

Bagian pertama, bab I, merupakan pendahuluan yang memuat penjabaran latar belakang sebagai landasan gambaran isu permasalahan yang terjadi yang menggerakkan roda penulisan penelitian ini, dua rumusan masalah sebagai acuan penelitian dan tujuan serta kegunaan dari penelitian yang dilaksanakan penulis.

Bab II yaitu kerangka berpikir dari penelitian yang terbagi menjadi tinjauan pustaka, dan teori dan konsep. Tujuan dari kerangka berpikir yakni untuk menetapkan arah jalan dimana penulisan penelitian akan bergerak. Tinjauan pustaka akan memuat rangkaian rangkuman hasil penelitian dari ahli yang kredibel mengenai iklim penghambat inklusivitas aktivis perempuan dalam proses perdamaian, peran bina damai melalui proses formal dan informal. Selain itu, penulisan penelitian menggunakan paradigma feminisme liberal untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, dengan konsep yang akan dikemukakan antara lain perdamaian, bina damai, serta gender dan bina damai.

Bab III akan membahas metodologi penelitian dengan perangkatnya meliputi pendekatan penelitian, metode penelitian, proses pengumpulan data dan

proses analisis data. Pendekatan penelitian kualitatif menjadi pilihan dalam melaksanakan penelitian ini untuk lebih mendalami korelasi antara gender dan perdamaian. Untuk memahami hubungan antara gender dan perdamaian, maka metode penelitian penulisan ini menggunakan studi kasus dengan tujuan untuk mempelajari rangkaian program aktivitas bina damai yang dilakukan oleh para aktivis perempuan Sudan Selatan. Proses pengumpulan data menggunakan data-data sekunder berupa artikel daring, buku, dan hasil kompilasi wawancara yang telah diolah, dan proses analisis data menggunakan analisis naratif untuk menjelaskan dan mengolah rangkaian peristiwa kelompok perempuan dalam struktur masyarakat Sudan Selatan juga segala proses bina damai yang dilaksanakan para aktivis perempuan untuk mengubah status quo di Sudan Selatan.

Bab IV memuat analisis penelitian yang bertujuan untuk mengolah berbagai data-data yang telah dikumpulkan dan dikemukakan dalam dua bab sebelumnya. Penjabaran analisis akan dimulai dengan mengelaborasi kondisi komunitas perempuan Sudan Selatan dalam kehidupan komunitas perempuan di masa konflik bersenjata Sudan Selatan, dalam bingkai sistem bermasyarakat sebelum proses bina damai berlangsung, keterlibatan aktivis perempuan Sudan Selatan dalam proses bina damai di tahun 2005-2018 dilihat dari tingkat aktor (tingkat atas, menengah, dan akar rumput), dan respons masyarakat Sudan Selatan terhadap proses bina damai yang dilaksanakan oleh aktivis perempuan.

Bab V menjadi bagian akhir dari penelitian. Bab V sebagai penutup berisikan kesimpulan dan saran. Subbab kesimpulan memaparkan intisari dari

segenap penelitian yang dilakukan sesuai dengan panduan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Sedangkan subbab saran akan memaparkan pendapat atau masukan penulis untuk kalangan civitas akademi maupun praktisi yang akan menekuni studi gender dan perdamaian.

